

RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Perintis RT VII, Kel. Tideng Pale Kec. Sesayap Kode Pos 77611

Email : capilktt@gmail.com, Whatsapp: 0823-5482-0812

Website : <https://disdukcapil.tanatidungkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NOMOR : 900/ /DKCS-KTT/I/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2021 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 02);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
26. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor);
27. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026.
- KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan.
- KEDUA : RENJA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada Tahun 2026.

KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab III Tujuan dan Sasaran

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah

Bab V Penutup

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



Rahmawani, S.Hut.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198007202006042016

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/ /DKCS-KTT/I/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Ketua	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
3	Kelompok Kerja	- Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan - Penyusun Program dan Evaluasi



Kepala Dinas,

Rahmawani, S.Hut.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198007202006042016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja ini ber pedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan adanya Rancangan Awal Renja ini, kegiatan yang diproyeksikan dimasa yang akan datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini diucapkan terima kasih, dan semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara.

Tideng Pale, Januari 2025
Kepala Dinas,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Rahmawani, S.Hut.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198007202006042016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi. Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026.

Rencana kerja dalam 1 (satu) tahun mendatang yang merupakan panduan atau acuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan agar supaya sesuai rencana dan tepat sasaran serta multi fungsi, dengan suatu Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Renja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung (2022-2026) dan Renstra RKPD. Renja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2026 hanya berdasarkan kebutuhan Prioritas yang perlu dicukupi demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tana Tidung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai “Terwujudnya Kabupaten Tana Tidung Bermatabat, Sejahtera, Indah dan Humaris (Bersih)” yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan Renja OPD per Tahun.

Penyusunan Renja OPD merujuk pada dokumen Renstra OPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun RencanaPembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan. Untuk setiap Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, dalam hal ini penyusunan Rancangan Awal Renja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengacu kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan rancangan RENJA perangkat daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ Lintas perangkat daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran - sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah dengan memperhatikan kesepakatan pada hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja yang memuat urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan dimaksudkan untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintah serta memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan selama 1 Tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, Sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2024.
- 2) Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2026 dan prakiraan 2027.
- 3) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026.
- 4) Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
- 5) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja / langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternative pembiayaan program dan kegiatan.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini bab ini berisi catatan penting yang petrlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2025 mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, maka sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran perangkat daerah yakni meningkatkan cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan. Adapun penjabaran realisasi program /kegiatan berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran sebesar 100% terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93,37% atau senilai Rp.6.936.906.219,00 dari pagu program sebesar Rp. 7.429.606.400,00. Adapun capaian kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja 100.00% dan realisasi keuangan 55.56%. dikarenakan terdapat beberapa eksemplar yang tidak dipenuhi serta tidak terlaksananya iklan pada media.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian kinerja 100% dan realisasi

keuangan 84.58%. Hal tersebut dikarenakan utk Sosialisasi dan Honorarium sudah tidak dapat di akomodir.

2. Program Pencatatan Sipil dengan target Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun sebesar 100% terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92.55% atau senilai Rp.292.124.261,00 dari pagu program sebesar Rp. 315.649.800,00. Adapun capaian kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil pada Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 100.00% dan realisasi keuangan 36.77%. Kurangnya Anggaran yang diperlukan utk mengadakan kegiatan Sosialisasi.

- b) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran sebesar 100% terealisasi 100% dengan realisasi keuangan sebesar 93,37% atau senilai Rp. 6.936.906.219,00 dari pagu program sebesar Rp. 7.429.606.400,00. Adapun capaian kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian kinerja adalah 100% dengan realisasi keuangan sebesar 92,98%
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,50%
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,62%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 78,72%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,08%
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 91,74%

2. Program Pendaftaran Penduduk

- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar 52,53%
- Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar 87,19%

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Informasi Administrasi

- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,05%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan capaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar 78,48%.
- c) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya:
- Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Belum tersedianya jaringan VPN yang merata di daerah Kabupaten Tana Tidung.
 - Masih rendahnya OPD yang melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama.
- d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya:
- Gencar dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa maupun masyarakat secara langsung akan arti pentingnya sebuah dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - Melakukan Kegiatan Jemput Bola untuk menjangkau masyarakat yang ada di Perdesaan.
 - Pemerataan secara maksimal penyediaan jaringan VPN dimana agar dapat membantu mempermudah OPD mendapatkan akses dalam Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun sebelumnya (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (2024)		Keterangan
				7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA (Dengan Satuan %) Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan Satuan)		Rp 403,509,084.00	90 % 0.998 Satuan	Rp 261,527,500.00 Rp 176,204,600.00		Rp 7,740,000.00		Rp 32,095,000.00		Rp 25,704,436.00		Rp 255,052,188.00		Rp 320,591,624.00	122.58 % 181.94 %		Rp 724,100,718.00		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk																				
1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Rp 138,550,062.00	1 Dokumen	Rp 176,204,600.00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 5,412,436.00	1 Dokumen	Rp 87,154,501.00	1 Dokumen	Rp 92,566,937.00	100.00 %	52.53 %	2 Dokumen	Rp 231,116,999.00	
2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	0 Dokumen	Rp 0	Di sub kegiatan ini yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
3		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	0 Laporan	Rp 0	Sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di tahun 2024 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																				
4		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	Rp 164,011,896.00	500 Dokumen	Rp 261,527,500.00	120 Dokumen	Rp 7,740,000.00	100 Dokumen	Rp 32,095,000.00	95 Dokumen	Rp 20,292,000.00	185 Dokumen	Rp 167,897,687.00	500 Dokumen	Rp 228,024,687.00	100.00 %	87.19 %	501 Dokumen	Rp 392,036,583.00	
5		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Rp 100,947,136.00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %	1 Laporan	Rp 100,947,136.00	Sub kegiatan ini yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
Rata-rata capaian kinerja (%)								4.80	0.59	4.00	2.45	3.80	2.17	27.40	22.73			40.00	27.94			
Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR				
	Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelairan Usia 0-18 Tahun (Dengan Satuan %)						Rp 0		Rp 15,379,000.00		Rp 59,003,204.00		Rp 217,742,057.00			92.63 %		Rp 592,060,459.00		
		Pelayanan Pencatatan Sipil																				
6		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	Rp 299,936,198.00	1 Layanan	Rp 66,580,000.00	1 Layanan	Rp 0	1 Layanan	Rp 8,020,000.00	1 Layanan	Rp 15,200,000.00	1 Layanan	Rp 42,460,000.00	1 Layanan	Rp 65,680,000.00	100.00 %	98.65 %	1 Layanan	Rp 365,616,198.00	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																				
7		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Sipil	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 241,953,800.00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 7,359,000.00	0 Laporan	Rp 43,803,204.00	1 Laporan	Rp 172,776,057.00	1 Laporan	Rp 223,938,261.00	100.00 %	92.55 %	1 Laporan	Rp 223,938,261.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disdukcapil melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 300.000
8		Sosialisai Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 6,816,000.00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 2,506,000.00	1 Laporan	Rp 2,506,000.00	100.00 %	36.77 %	1 Laporan	Rp 2,506,000.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)								33.33	0.00	33.33	5.03	33.33	13.64	100.00	57.32			100.00	75.99			
Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	R			ST	T			

	Meningkatnya jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPDD yang memanfaatkan Data kependudukan dengan perjanjian Kerjasama (DDengan Satuan OPD)						Rp 17,931,400.00		Rp 79,215,400.00		Rp 78,594,097.00		Rp 557,906,182.00				93.55 %		Rp 1,187,650,225.00	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																				
9		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	0 Dokumen	Rp 0	Sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di tahun 2024 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
10		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	Rp 59,403,552.00	1 Dokumen	Rp 171,768,400.00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 8,359,000.00	0 Dokumen	Rp 27,646,825.00	1 Dokumen	Rp 125,535,070.00	1 Dokumen	Rp 161,540,895.00	100.00 %	94.05 %	2 Dokumen	Rp 220,944,447.00	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																				
11		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 285,275,042.00	1 Laporan	Rp 599,193,800.00	0 Laporan	Rp 17,931,400.00	0 Laporan	Rp 70,856,400.00	0 Laporan	Rp 50,947,272.00	1 Laporan	Rp 321,414,912.00	1 Laporan	Rp 461,149,984.00	100.00 %	76.96 %	2 Laporan	Rp 746,425,026.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disuducapil melakukan pergeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 92.434.000
12		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Rp 109,324,552.00	1 Laporan	Rp 13,250,000.00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 110,956,200.00	1 Laporan	Rp 110,956,200.00	100.00 %	837.41 %	2 Laporan	Rp 220,280,752.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disuducapil melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 208.943.800
Rata-rata capaian kinerja (%)									0.00	0.75	0.00	4.17	0.00	6.15	75.00	241.03		75.00	252.10			
Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR	SR	SR	S	UNK		S	UNK			
	Meningkatnya jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten (Dengan Satuan:%)						Rp 0		Rp 0		Rp 0		Rp 101,723,980.00				87.47 %		Rp 139,623,980.00	
		Penyusunan Profil Kependudukan																				
13		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	0 Dokumen	Rp 0	Sub kegiatan ini proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja berdasarkan Renja yang telah ditentukan sebelumnya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran
14		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi	1 Dokumen	Rp 37,900,000.00	1 Dokumen	Rp 116,289,700.00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 101,723,980.00	1 Dokumen	Rp 101,723,980.00	100.00 %	87.47 %	2 Dokumen	Rp 139,623,980.00	
Rata-rata capaian kinerja (%)									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	43.74		50.00	43.74			
Predikat kinerja									SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		SR	SR			
		NON URUSAN																				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																				
	Meningkatnya kualitas waktu pengurusan dokumen Adminduk	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)						Rp1,097,599,141.00		Rp1,209,545,885.00		Rp1,500,660,858.00		Rp3,129,100,335.00				91.92 %		Rp 13,556,614,139.00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
15		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 5,558,000.00	4 Dokumen	Rp 5,582,600.00	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 4,440,000.00	1 Dokumen	Rp 1,134,200.00	4 Dokumen	Rp 5,574,200.00	100.00 %	99.85 %	9 Dokumen	Rp 11,132,200.00	
16		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 10,234,200.00	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 8,730,400.00	2 Dokumen	Rp 8,730,400.00	100.00 %	85.31 %	2 Dokumen	Rp 8,730,400.00	
17		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 5,433,500.00	3 Laporan	Rp 5,802,300.00	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 5,106,000.00	1 Laporan	Rp 690,000.00	3 Laporan	Rp 5,796,000.00	100.00 %	99.89 %	7 Laporan	Rp 11,229,500.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
18		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	Rp3,223,242,778.00	#####	Rp 4,100,380,940.00	22 Orang/bulan	Rp 990,539,664.00	22 Orang/bulan	Rp 922,195,614.00	#####	Rp 719,166,361.00	22 Orang/bulan	Rp 1,040,857,888.00	22 Orang/bulan	Rp3,672,759,527.00	88.00 %	89.57 %	22 Orang/bulan	Rp 6,896,002,305.00	Setelah penetapan pagi renja perubahan Disuducapil melakukan pergeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 356.742.710
19		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 146,590,000.00	12 Dokumen	Rp 175,080,000.00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 148,080,000.00	12 Dokumen	Rp 148,080,000.00	100.00 %	84.58 %	24 Dokumen	Rp 294,670,000.00	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
20		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	Rp 21,621,846.00	6 Orang	Rp 246,443,200.00	0 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 22,823,351.00	5 Orang	Rp 57,163,645.00	4 Orang	Rp 167,539,069.00	11 Orang	Rp 247,526,065.00	183.33 %	100.44 %	14 Orang	Rp 269,147,911.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 99.742.800
21		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	151 Orang	Rp 103,071,890.00	200 Orang	Rp 102,754,300.00	0 Orang	Rp 0	200 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 13,160,000.00	0 Orang	Rp 0	200 Orang	Rp 13,160,000.00	100.00 %	12.81 %	351 Orang	Rp 116,231,890.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan pengeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 89.594.300
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 602,975,000.00	10 Paket	Rp 620,747,282.00	1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 78,600,000.00	2 Paket	Rp 22,428,000.00	6 Paket	Rp 688,154,300.00	10 Paket	Rp 789,182,300.00	100.00 %	127.13 %	14 Paket	Rp 1,392,157,300.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 233.868.928
23		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rp 588,348,500.00	9 Paket	Rp 717,917,182.00	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 259,771,800.00	4 Paket	Rp 345,812,000.00	9 Paket	Rp 605,583,800.00	100.00 %	84.35 %	18 Paket	Rp 1,193,932,300.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 8.388.000
24		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 58,179,000.00	10 Paket	Rp 71,960,000.00	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 33,166,000.00	5 Paket	Rp 53,536,000.00	10 Paket	Rp 86,702,000.00	100.00 %	120.49 %	14 Paket	Rp 144,881,000.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 21.929.600
25		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	864 Dokumen	Rp 4,760,000.00	1140 Dokumen	Rp 8,640,000.00	156 Dokumen	Rp 0	156 Dokumen	Rp 1,200,000.00	288 Dokumen	Rp 2,000,000.00	540 Dokumen	Rp 1,600,000.00	1140 Dokumen	Rp 4,800,000.00	100.00 %	55.56 %	2004 Dokumen	Rp 9,560,000.00	
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	80 Laporan	Rp 607,058,660.00	50 Laporan	Rp 470,065,000.00	18 Laporan	Rp 70,070,777.00	13 Laporan	Rp 84,617,570.00	18 Laporan	Rp 99,824,498.00	20 Laporan	Rp 210,823,523.00	69 Laporan	Rp 465,336,368.00	138.00 %	98.99 %	149 Laporan	Rp 1,072,395,028.00	
27		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp 45,200,000.00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0.00 %	0.00 %	1 Dokumen	Rp 45,200,000.00	Di sub kegiatan ini yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, hal ini berdampak pada pencapaian target kinerja berdasarkan Renja yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																				
28		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 339,900,000.00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0.00 %	0.00 %	1 Unit	Rp 339,900,000.00	Di sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan di tahun 2024 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD
29		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp 193,668,796.00	3 Unit	Rp 318,087,078.00	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 134,393,300.00	1 Unit	Rp 107,924,350.00	3 Unit	Rp 242,317,650.00	100.00 %	76.18 %	13 Unit	Rp 435,986,446.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan pengeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 10.274.800
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
30		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Laporan	Rp 2,500,000.00	75 Laporan	Rp 3,500,000.00	5 Laporan	Rp 0	18 Laporan	Rp 1,000,000.00	25 Laporan	Rp 500,000.00	27 Laporan	Rp 2,000,000.00	75 Laporan	Rp 3,500,000.00	100.00 %	100.00 %	150 Laporan	Rp 6,000,000.00	
31		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 224,124,146.00	12 Laporan	Rp 238,396,118.00	3 Laporan	Rp 10,588,700.00	3 Laporan	Rp 18,547,750.00	3 Laporan	Rp 17,089,954.00	3 Laporan	Rp 181,487,005.00	12 Laporan	Rp 227,713,409.00	100.00 %	95.52 %	24 Laporan	Rp 451,837,555.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan pengeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 10.008.118
32		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 318,510,708.00	12 Laporan	Rp 318,516,000.00	1 Laporan	Rp 26,400,000.00	3 Laporan	Rp 79,200,000.00	3 Laporan	Rp 74,400,000.00	5 Laporan	Rp 97,425,600.00	12 Laporan	Rp 277,425,600.00	100.00 %	87.10 %	24 Laporan	Rp 595,936,308.00	Setelah penetapan pagu renja perubahan Disudkapi melakukan pengeseran di sub kegiatan ini sebesar Rp 26.479.200
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
33		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 58,953,000.00	3 Unit	Rp 82,770,000.00	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 39,502,900.00	1 Unit	Rp 37,336,000.00	3 Unit	Rp 76,838,900.00	100.00 %	92.83 %	5 Unit	Rp 135,791,900.00	
34		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Rp 70,012,096.00	84 Unit	Rp 49,540,000.00	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 1,361,600.00	10 Unit	Rp 18,548,400.00	72 Unit	Rp 35,970,000.00	84 Unit	Rp 55,880,000.00	100.00 %	112.80 %	95 Unit	Rp 125,892,096.00	Setelah penetapan renja pagu perubahan Disudkapi telah melakukan penambahan di sub kegiatan ini sebesar Rp 12.360.000
Rata-rata capaian kinerja (%)								14.80	2.59	28.06	7.01	25.31	26.18	40.49	45.39		95.47	81.17				
Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR		ST	T				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:																					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung harus terus ditingkatkan. Adapun pengukuran kinerja yang telah dicapai dapat diukur melalui indikator yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator SPM/Standar Nasional	IKK Outcome	Target Renstra PD (%)			Realisasi (%)			Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		-	81.25	85.00	87.50			89.41	94.00	95.50	
2	Persentase Penduduk Wajib KTP memiliki KTP-EI			80,00	85,00	90,00	92,85	98,04	99.46	99,80	99,90	
3	Persentase penduduk usia 0-18 Thn memiliki Akta Kelahiran			85.00	89.00	95.00	90,07	93.03	94.32	97.00	98.00	
4	Persentase anak memiliki identitas anak (KIA)			80.00	86.00	90.00	82,04	88.05	90.00	90.00	95.00	
5	Jumlah instansi pengguna pemanfaatan data kependudukan			6	3	3	1	1	3	3	3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Berdasarkan Kinerja Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung sampai dengan tahun 2024 yang melaksanakan 5 (Lima) program substantif yaitu program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung untuk Perencanaan Tahun 2024 meliputi:
 - 1) Masih adanya beberapa jabatan kosong, namun sampai akhir tahun anggaran selesai jabatan kosong tersebut belum terpenuhi, sehingga penyerapan anggaran belanja pegawai jauh dari target yang direncanakan;
 - 2) Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3) Masih rendahnya OPD yang melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama dikarenakan belum meratanya ketersediaan jaring VPN di setiap OPD;
 - 4) Masyarakat daerah pedalaman dan terisolir sulit mendapatkan pelayanan Adminduk;
 - 5) Belum optimalnya Penyajian data kependudukan;
 - 6) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 7) Belum optimalnya Pemanfaatan data kependudukan; dan
 - 8) Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak optimal, hal ini ditandai dengan kurang tercapainya target yang telah ditetapkan.
4. Tantangan peluang

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Threats (tantangan) Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Kekuatan (*S*) :

1. Regulasi dan kebijakan yang jelas untuk menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;
2. Dukungan penuh pimpinan dan keterlibatan seluruh ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan capaian kinerja;
3. Jumlah sumber daya manusia yang ditunjang dengan kualifikasi ;
4. Alokasi anggaran untuk menunjang terlaksananya progam dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

B. Kelemahan (*W*) :

1. Letak lokasi pelayanan terpusat di ibu kota kabupaten;
2. Kemampuan sumber daya manusia aparatur kependudukan dan pencatatan sipil yang perlu terus ditingkatkan;
3. Sarana dan prasarana yang masih belum merata dan menjangkau seluruh fasilitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Ketersediaan jaringan VPN yang belum merata di setiap OPD.

C. Lingkungan Eksternal

Peluang (*O*) :

1. Antusiasme warga masyarakat terhadap kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;
2. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang terus bertambah tiap tahunnya;
3. Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya;
4. Ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Tidung;
5. Data kependudukan yang dijadikan data dasar pelayanan publik.

D. Tantangan (*T*) :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan;
2. Mudahnnya warga negara asing masuk ke daerah perbatasan dengan alasan kekeluargaan tanpa dokumen kependudukan yang jelas;
3. Pelayanan administrasi kependudukan yang harus mengikuti perkembangan teknologi;
4. Kondisi geografis yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman yang

menyebabkan masyarakat di daerah tersebut sulit menjangkau fasilitas pelayanan administrasi kependudukan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan arahan Kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				Rp 7,429,606,400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				Rp 8,233,424,804.00
021201201	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				Rp 21,619,100	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah				Rp 21,619,100
021201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5,582,600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 5,582,600
021201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 5,802,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 5,802,300.00
021201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,234,200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Rp 10,234,200.00

021201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 3,918,718,230	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 4,275,460,940.00
021201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tana Tidung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	Rp 3,743,638,230	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tana Tidung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	Rp 4,100,380,940.00
021201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	Rp 175,080,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	Rp 175,080,000
021201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 359,346,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 452,754,300
021201205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	Rp 346,186,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	Rp 350,000,000
021201205010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	Rp 13,160,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	Rp 102,754,300
021201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 2,153,515,992	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 1,949,264,464
021201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 854,616,210	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 620,747,282
021201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rp 726,305,182	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rp 717,917,182
021201206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Rp 93,889,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Rp 71,960,000
021201206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1140 Dokumen	Rp 8,640,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1140 Dokumen	Rp 8,640,000
021201206009	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 470,065,000	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 530,000,000
021201206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-

021201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 307,812,278	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 800,000,000
021201207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 600,000,000
021201207005	Pengadaan Mebel	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 307,812,278	Pengadaan Mebel	Kab. Tana Tidung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Rp 200,000,000
021201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 523,924,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 602,016,000
021201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Laporan	Rp 3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75 Laporan	Rp 3,500,000
021201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 228,388,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Rp 280,000,000
021201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 292,036,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 318,516,000
021201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 144,670,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 132,310,000
021201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	Rp 82,770,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3 Unit	Rp 82,770,000
021201209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tana Tidung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan	84 unit	Rp 61,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tana Tidung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disedakan	84 unit	Rp 49,540,000

021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				437,732,100	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Rp 528,054,300
021202201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp 176,204,600	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Rp 176,204,600
021202201001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Rp 176,204,600	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	Rp 176,204,600
021202201002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	-
021202201004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-
021202203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp 261,527,500	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Rp 351,849,700
021202203002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500 Dokumen	Rp 261,527,500	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500 Dokumen	Rp 351,849,700
021202203005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-
021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp 315,649,800	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Rp 572,074,060.00
021203201	Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp 66,580,000	Pelayanan Pencatatan Sipil				Rp 151,155,670.00
021203201002	peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	Rp 66,580,000	peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	Rp 151,155,670.00

021203202	Penyelenggaraan pencatatan sipil				Rp 249,069,800	Penyelenggaraan pencatatan sipil				Rp 420,918,390
021203202004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1 Laporan	Rp 242,253,800	Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Kab. Tana Tidung	Koordinasi dengan kantor kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	1 Laporan	Rp 241,953,800
021203202008	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Rp 6,816,000	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Rp 178,964,590.00
021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp 900,722,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Rp 985,018,400
021204201	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp 171,768,400	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				Rp 171,768,400
021204201001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	-
021204201002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	Rp 171,768,400	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	Rp 171,768,400
021204203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp 728,953,600	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Rp 813,250,000
021204203005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	Rp 222,193,800	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	Rp 13,250,000
021204203003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	Rp 506,759,800	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	Rp 800,000,000

021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp 116,289,700	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				Rp 116,289,700
021205201	Penyusunan Profil Kependudukan				Rp 116,289,700	Penyusunan Profil Kependudukan				Rp 116,289,700
021205201002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Tana Tidung	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	Rp 116,289,700	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Tana Tidung	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	Rp 116,289,700
021205201001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Tana Tidung	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Tana Tidung	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
	TOTAL				Rp 9,200,000,000	TOTAL				Rp 10,434,861,264.00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Assosiasi, Organisasi Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari Pengamatan pelaksanaan Musrenbang. Namun dikarenakan belum adanya informasi usulan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung hingga disusunnya Renja ini, maka pada bagian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak menampilkan tabel rincian program dan kegiatan yang dimaksud.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Tana Tidung

No	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Prioritas Kabupaten/Kota

Kebijakan merupakan salah satu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumbernya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Rencana Kerja pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan kedalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 seharusnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung menjadi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026: **“TERWUJUDNYA TANA TIDUNG BERMARTABAT, SEJAHTERA, INDAH, DAN HUMANIS (BERSIH)”** Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, dirumuskan dalam 7 (Tujuh) Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Terpadu Tata Ruang Wilayah;
3. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam;
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
5. Meningkatkan Kemandirian Desa;
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; dan
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

Berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah dijabarkan diatas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung mendukung misi ke 6 (Enam) yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Namun dalam mendukung tercapainya prioritas daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat memberikan dampak secara langsung terhadap 10 (Sepuluh) program Prioritas Daerah, melainkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan dukungan terhadap hak-hak keperdataan bagi masyarakat khususnya kepemilikan atas dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data untuk semua keperluan dalam rangka mendukung program prioritas daerah. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuangkan indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 yang mendukung sepuluh program prioritas daerah pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah

Prioritas Daerah	Program yang mendukung Prioritas Daerah	Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah	Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Daerah	Lokasi
7. Optimalisasi birokrasi dalam menjaga performa agar mencapai target pembangunan yang ditentukan	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan secara Aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Kab. Tana Tidung
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Tana Tidung
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Kab. Tana Tidung
			Pelayanan secara Aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Tana Tidung
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Tana Tidung
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung

3.2. Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung yaitu Tertib administrasi kependudukan, Tujuan dan Sasaran disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target 2026
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Pelayanan Admindak	Meningkatnya Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92%
	Meningkatnya Jumlah OPD yang Melakukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2. Jumlah Perjanjian Kerjasama Sekaligus Melakukan Pemanfaatan Data Kependudukan	6 OPD
	Meningkatnya Kualitas Waktu Pengurusan Dokumen Admindak	3. Rata-Rata Waktu Pengurusan Dokumen Admindak	1 Hari Kerja*

*1 hari kerja = 9 jam

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Admindak melalui Peningkatan Profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan dan peningkatan

kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Program - program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut

:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Kegiatan ini merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- A. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- H. Penataan Pendaftaran Penduduk
- J. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- K. Pelayanan pencatatan sipil
- L. Penyelenggaraan pencatatan sipil
- M. Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- N. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- O. Penyusunan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan ini merupakan suatu tindakan dari penjabaran Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka Sub kegiatan - Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 6) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 12) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 13) Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 14) Pengadaan Mebel
- 15) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 21) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
- 22) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
- 23) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- 24) Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- 25) peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil
- 26) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil
- 27) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
- 28) Fasilitasi terkait pencatatan sipil

- 29) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
- 30) Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- 31) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 32) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 33) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- 34) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 arah Kebijakan Umum APBD, direncanakan kegiatan yang benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, dengan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SESUAI INPUTAN RENSTRA 2021-2026		Rancangan Awal DISDUKCAPIL 2026		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		KETERANGAN
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		100	4,492,200,000		7,546,416,200		8,233,424,804	SEKRETARIAT
021201201	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100	90,000,000		21,619,100		21,619,100	
021201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	10,000,000	4 Dokumen	5,582,600	4 Dokumen	5,582,600	
021201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	30,000,000	3 Laporan	10,234,200	4 Laporan	10,234,200	
021201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	20,000,000	2 Dokumen	5,802,300	4 Dokumen	5,802,300	
21201201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi (Dengan Satuan:dokumen)	1	30,000,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada d Tahun Berjalan
021201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	3,300,000,000		4,275,460,940		4,275,460,940	
021201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	3,150,000,000	25 Orang	4,100,380,940	25 Orang	4,100,380,940	
021201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12	150,000,000	12 Dokumen	175,080,000	12 Dokumen	175,080,000	
021201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80	60,000,000		349,197,500		452,754,300	
021201205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	40,000,000	6 orang	246,443,200	22 orang	350,000,000	Bertambah Dikarenakan Diklat Fungsional dan Bimtek Kinerja
021201205010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	10,000,000	200 Orang	102,754,300	150 Orang	102,754,300	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas (Dengan Satuan:stel)	30	10,000,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada d Tahun Berjalan
021201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	495,200,000		1,889,329,464		1,949,264,464	
021201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	50,000,000	10 Paket	620,747,282	10 Paket	620,747,282	
021201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	100,000,000	9 Paket	717,917,182	9 Paket	717,917,182	
021201206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	40,000,000	10 Paket	71,960,000	10 Paket	71,960,000	
021201206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730	15,200,000	1140 Dokumen	8,640,000	12 Dokumen	8,640,000	
021201206009	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	250,000,000	50 Laporan	470,065,000	12 Laporan	530,000,000	Bertambah Dikarenakan adanya Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan 2 Kali dalam Setahun
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan (Dengan Satuan:kali)	10	10,000,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada d Tahun Berjalan
021201206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	30,000,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada d Tahun Berjalan

021201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	125,000,000		318,087,078		800,000,000	
021201207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	100,000,000			1 Unit	600,000,000	Pengadaan Mobil Operasional utk Pelayanan (Hilux Pick Up)
021201207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20	25,000,000		318,087,078	3 Paket	200,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Arsiparis
021201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	362,000,000		560,412,118		602,016,000	
021201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	3,000,000	75 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	
021201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	95,000,000	12 laporan	238,396,118	12 laporan	280,000,000	Bertambah Dikarenakan Mengikuti Tarif Pemakaian Listrik
021201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10	264,000,000	12 Laporan	318,516,000	12 Laporan	318,516,000	
021201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	60,000,000		132,310,000		132,310,000	
021201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2	30,000,000	3 Unit	82,770,000	2 Unit	82,770,000	
021201209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	30,000,000	84 unit	49,540,000	54 unit	49,540,000	
021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		0.999	322,317,670		437,732,100		528,054,300	
021202201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100	154,707,668		176,204,600		176,204,600	
021202201001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	300	64,467,667	1 Dokumen	176,204,600	1 Dokumen	176,204,600	
021202201002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2000	25,780,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021202201004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	500	64,460,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase tersedinya dokumen kependudukan (Dengan Satuan:%)	100%	90,250,000					
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	jumlah pengadaan formulir (Dengan Satuan:paket)	1	90,250,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021202203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100	77,360,002		261,527,500		351,849,700	
021202203002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	500	38,680,001	500 Dokumen	261,527,500	4 Dokumen	351,849,700	Bertambah dikarenakan Karena perjalanan untuk dalam daerah di tahun sebelumnya tidak ada sehingga dimasukkan,dan Aplikasi Silaris belum dimasukkan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan
021202203005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1	38,680,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan

021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		98	309,438,350		315,349,800		572,074,060	
021203201	Pelayanan Pencatatan Sipil		1	77,378,345		66,580,000		151,155,670	
021203201002	peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1000	64,488,344	1 Layanan	66,580,000	1 Layanan	151,155,670	Bertambah Karena sebelumnya hanya ada perjalanan ke desa tidak ada inti kegiatan nya
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	jumlah pengadaan formulir (Dengan Satuan:paket)	1	12,890,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021203202	Penyelenggaraan pencatatan sipil		100	219,170,004		248,769,800		420,918,390	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	jumlah penyelesaian perkara nikah/talak/cerai (Dengan Satuan:dokumen)	100	118,930,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021203202004	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan	50	38,680,001	1 Laporan	241,953,800	1 Laporan	241,953,800	
021203202008	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1	25,780,001	1 Laporan	6,816,000	1 Laporan	178,964,590	Bertambah dikarenakan Mengadakan Sosialisasi Per Kecamatan terkait Pencatatan Sipil
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	jumlah kerjasama penerbitan dokumen pencatatan sipil (Dengan Satuan:MoU)	1	25,780,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peralatan pencetakan dokumen pencatatan sipil (Dengan Satuan:paket)	7	10,000,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Operator SIAK Capil yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	80%	12,890,001					
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	jumlah operator SIAK Capil yang bersertifikat (Dengan Satuan:orang)	1	12,890,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		6	496,394,815		784,212,200		985,018,400	
021204201	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100	199,874,809		171,768,400		171,768,400	
021204201001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	64,494,808					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204201002	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	96,700,000	1 Dokumen	171,768,400		171,768,400	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang di inventarisasi untuk pembangunan daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	38,680,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	270,740,004		612,443,800		813,250,000	
021204203005	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah pelaksanaan sosialisasi PIAK (Dengan Satuan:kegiatan)	1	38,680,001	1 Laporan	13,250,000	1 Laporan	13,250,000	
	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi (Dengan Satuan:MoU)	1	64,460,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan

	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah koordinasi antar lembaga (Dengan Satuan:kegiatan)	1	25,780,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204203003	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah pelaksanaan bimtek SIAK untuk aparat Desa/Kec/Disdukcapil (Dengan Satuan:kegiatan)	1	38,680,001	1 Laporan	599,193,800	1 Laporan	800,000,000	Bertambah Dikarenakan adanya Pemutakhiran data Kependudukan mengingat perlu dilakukan dan Inovasi yang dilaksanakan serta Pemeliharaan Aplikasi
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pemanfaatan data penduduk (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	38,680,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan komunikasi, edukasi dan informasi (Dengan Satuan:Kegiatan)	1	64,460,000					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204204	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100	25,780,002		-		-	
021204203005	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah operator adb dan SIAK yang mengikuti Bimtek (Dengan Satuan:orang)	1	12,890,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021204203003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	jumlah pelaksanaan supervisi (Dengan Satuan:kali)	1	12,890,001					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		1	25,820,447		116,289,700		116,289,700	
021205201	Penyusunan Profil Kependudukan		100	25,820,447		116,289,700		116,289,700	
021205201002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1	12,926,913	1 Dokumen	116,289,700	1 Dokumen	116,289,700	
021205201001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	12,893,534					Sub Kegiatan yang ada di Renstra tetapi tidak ada di Tahun Berjalan
TOTAL				5,646,171,282		9,200,000,000		10,434,861,264	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan dengan lebih mengedepankan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga target indikator kinerja tahun ini dapat tercapai dengan baik.

Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan SKPD.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



Rahmawani. S.Hut.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198007202006042016